

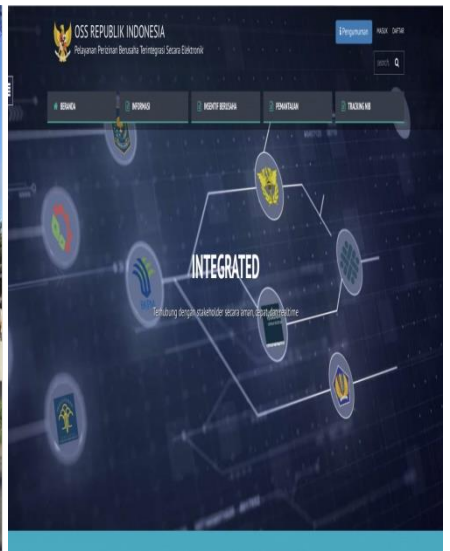
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA BIMA

TAHUN ANGGARAN 2019

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		
Kategori	Jumlah	Saldo
Perizinan	120	120
Non Perizinan	150	150
Total	270	270



dpmptsp
Kota Bima

Jl. Gajah Mada No.10 Kel Pane Kec. Rasane
Barat Kota Bima - NTB

2020



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T . Kami sampaikan karena atas ijin Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2019 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk dari pengangkatan Status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Bima oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bima yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima, dengan melaksanakan 2 (Dua) Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Meningkatnya Nilai Investasi .

Segala Upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi-misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dan LKIP 2019 adalah wujud dari pertanggung jawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2019 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Kota Bima, Februari 2020

Kepala Dinas,

Drs. H. Syarifuddin, M.AP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19621029 199403 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
3. KONDISI ORGANISASI	2
B. TUGAS POKOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA	3
1. TUGAS	3
2. FUNGSI	3
3. STRUKTUR ORAGANISASI	17
4. DATA PEGAWAI DPMPTSP	18
C. KEWENANGAN DPMPTSP	19
D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023	21
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
2.3 PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019	30
3.1.2 EVALUASI KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	34
3.1.3.EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	35
3.1.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	42
3.2 CAPAIAN KINERJA ESELON	45
3.3 AKUNTABILITAS ANGGARA	49
BAB IV PENUTUP	53



DAFTAR TABEL

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bima	18
Tabel. 1 data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselonering	19
Tabel. 2 Data Menurut Golongan/Ruang	19
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah DPMPTSP	21
Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra	22
Table 2.3 Perjanjian Kinerja	23
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	29
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pencapaian Sasarab Tahun 2019	30
Table 3.1.1 tingkat pencapaian masing-masing indicator kinerja sasaran dari Hasil capaian indicator kinerja	30
Table 3.1.1.2. tingkat pencapaian masing-masing indicator kinerja berdasarkan Program dan kegiatan tahun 2019	31
Tabel.3.1.2 Evaluasi Keselarasan Dokumen Perencanaan & Penganggaran...	34
Tabel. 3.1.a Pengukuran Kinerja IKM	35
Grafik Realisasi IKM	36
Table rekapitulasi pencapaian indicator kinerja utama untuk IKM	36
Tabel 3.1.b. Pengukuran Kinerja Porsentase Nilai Investasi	38
Tabel. Rekapitulasi Nilai Investasi Pelaku usaha dikota bima	38
Grafik Realisasi Nilai Investasi	39
Tabel. 3.1.b Pengukuran Kinerja Porsentase Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA	40
Grafik Rekapitulasi Perbulan jumlah investor PMDN/PMA thn 2019	41
Grafik Jumlah tenaga kerja berdasarkan NIB	41
Tabel 3.1.4 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya	43
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Eselon	45
Table 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312), yang mempunyai Tugas kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana pada visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pada Renstra 2018-2023.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta Renja sesuai dengan Perubahan Renstra 2014-2018 (Renstra Tahun Pertama), termasuk kinerja yang berkaitan dengan SPM yang telah dilaporkan sesuai target BKPM.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan investasi dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target,

capaian dan realisasi terhadap pengelolaan keuangan perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaikan laporan akuntabilitas keuangan kepada pemerintah daerah (Walikota).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai Sebagai salah satu pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh setiap perangkat Daerah (PD).

Adapun tujuan dari laporan kinerja instansi pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kekurangannya untuk dievaluasi. sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang disamping untuk informasi bagi masyarakat yang memerlukan.

3. Kondisi organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP TSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota



Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan,yang meliputi Bidang Penanaman Modal, Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan, Bidang Pelayanan Perizinan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa kali perubahan pelimpahan kewenangan dari Keputusan Walikota Bima Nomor 35 tahun 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan yang semula 8 jenis izin usaha menjadi 100 jenis usaha yang ditangani ,kemudian Perubahan Peraturan Walikota Bima nomor 35 tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan menjadi 99 jenis usaha yang dilayani pada DPMPTSP Kota Bima.

B. TUGAS POKOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA.

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai Berikut :

1. TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang



menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
 - e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, dan ;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. Pengumpulan, pengolahan penyajian data dan statistik di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
 - h. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - i. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan

Kepala Bidang Penanaman Modal

1. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal.



2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan Operasional Penyusunan program kerja dibidang penanaman modal daerah;
- b. Merencanakan Operasional Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah;
- c. Memberi petunjuk Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;
- d. Memberi petunjuk Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- e. Mengatur Pemetaan investasi daerah terkait dengan SDM dan UMKM serta usaha besar;
- f. Mengatur Perumusan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- g. Mengatur Perumusan usulan dan pemberian insentif diluar fiskal dan non fiskal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan penanaman modal;
- i. Membagi tugas Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Mengatur Fasilitasi kerja sama dunia usaha dibidang penanaman modal ditingkat kota;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Kepala Seksi Potensi dan Promosi

1. Seksi potensi dan promosi melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal dalam penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang potensi dan promosi;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tugas dan fungsi seksipotensi dan promosi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - b. Membimbing bawahan dalam Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - c. Menyusun formasi perkembangan Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - d. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data Pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
 - f. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - g. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan promosi investasi;
 - i. Mengevaluasi Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - j. Mengevaluasi kajian potensi dan pemasaran penanaman modal;
 - k. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



Kepala Seksi Kerjasama

1. Seksi kerja sama melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerja sama.
2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tugas dan fungsi seksi kerja sama sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Perumusan kebijakan teknis kerja sama penanaman modal daerah;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal;
 - c. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - e. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - f. Mengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama penanaman modal daerah;
 - g. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang kerja sama; dan
 - h. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

1. Melaksanakan pelayanan informasi, pengaduan, dan inovasi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :



- a. Merencanakan operasional Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
- b. Membagi tugas Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
- c. Memberi petunjuk Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
- d. Merencanakan operasional Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- e. Memberi petunjuk Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. Merencanakan operasional Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mutu layanan perizinan dan non perizinan;
- g. Menyusun Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;

- h. Mengevaluasi hasil Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- i. Merencanakan operasional Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- j. Melakukan Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- k. Mengevaluasi pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Layanan Informasi dan pengaduan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan informasi di bidang Layanan Informasi dan Pengaduan.
2. Untuk meyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;



- b. Menyusun formasi perkembangan Penyelenggaraan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mengevaluasi hasil Penyiapan bahan kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Memeriksa hasil Pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Membagi tugas Penyelenggaraan layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. Membimbing bawahan dalam Pelaksanaan analisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Menyusun formasi perkembangan Perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Merencanakan kegiatan Pengkoordinasian penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Melaporkan hasil kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- k. Membagi tugas dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam bidang Kebijakan dan Inovasi Pelayanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud sebagai mana dimaksud sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Penyusunan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Menyusun formasi perkembangan Penyiapan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
 - e. Mengevaluasi hasil kegiatan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;



- f. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
- g. Membagi tugas Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kepada bawahan;
- h. Membimbing bawahan dalam Pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal;
- i. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

1. Bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - a. Merencanakan operasional Penyusunan program kerja dibidang pelayanan perizinan;
 - b. Merencanakan operasional Penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - d. Merencanakan operasional Perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
 - e. Memberi petunjuk pelaksanaan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
 - f. Memberi petunjuk usulan persetujuan fasilitasi fiskal yang menjadi kewenanagn kota;
 - g. Mengatur pedoman dan tata cara pengembangan sistem;

- h. Menyelia permohonan izin dan non izin;
- i. Memberi petunjuk Pelayanan umum kepada dunia usaha mengenai perizinan yang diperlukan;
- j. Mengatur Sosialisasi kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan berkoordinasi dengan sekretariat;
- k. Memberi petunjuk Pengembangan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE); dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

1. Seksi pelayanan perizinan usaha melaksanakan tugas membantu kepala Bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha;
2. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan identifikasi jenis perizinan usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data perizinan usaha kepada bawahan;
 - d. Menyelia pelaksanaan Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan usaha;

- g. Merencanakan kegiatan Penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha dengan tim teknis;
- h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pelayanan perizinan usaha;
- i. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Merencanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan usaha;
- k. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan usaha; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala seksi pelayanan perizinan Non usaha

- 1. Seksi pelayanan perizinan Non usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu kepala Bidang perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan non usaha.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebaga berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan Identifikasi jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data dan penetapan retribusi perizinan non usaha;
 - d. Membimbing bawahan dalam Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;

- f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan non usaha;
- g. Memeriksa hasil Penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan non usaha;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha;
- i. Merencanakan Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan non usaha;
- k. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan perizinan non usaha; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

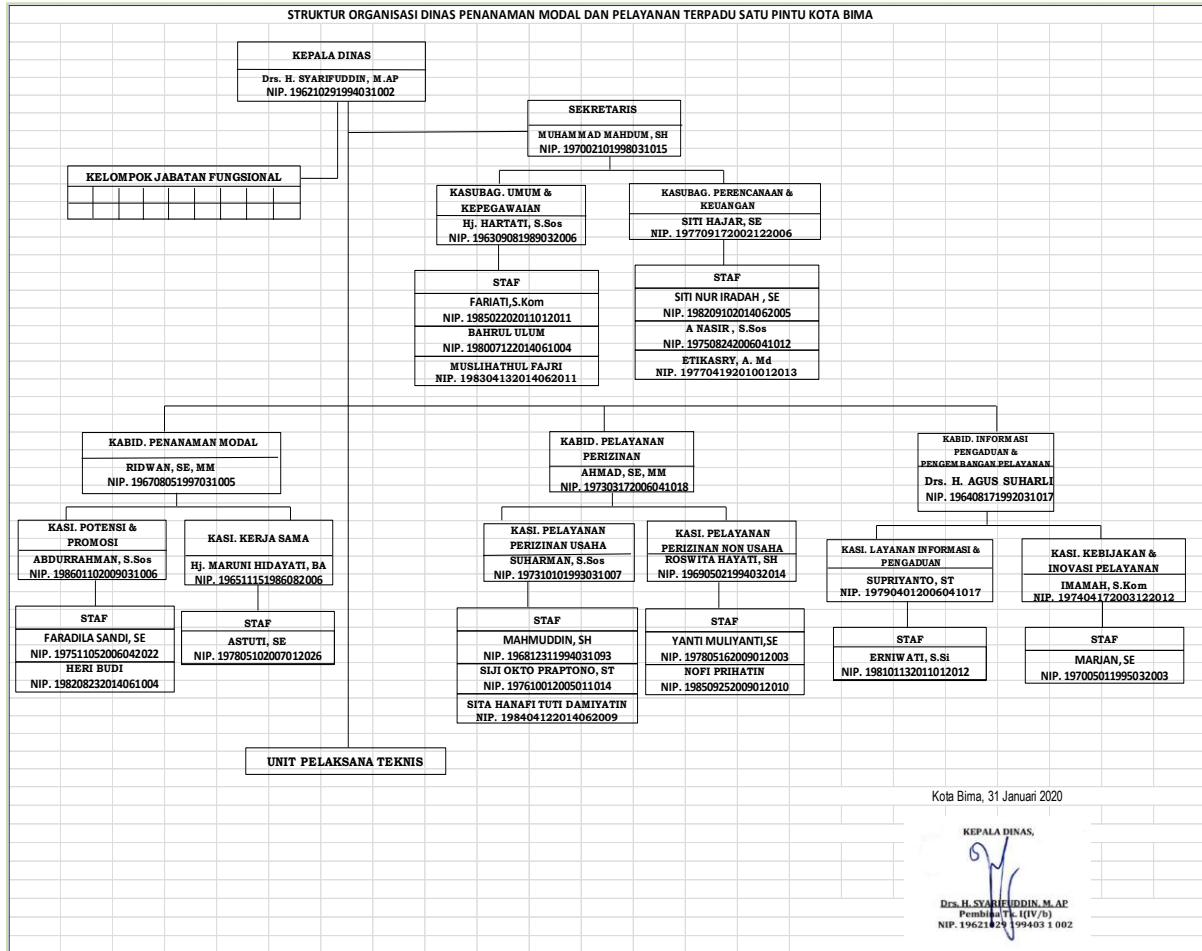
3. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Penanaman modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Potensi dan Promosi;
 - b. Seksi Kerja sama.
4. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan non Usaha.
5. Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Seksi layanan Informasi dan Pengaduan;

- b. Seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan
- 6. Unit Pelaksana Teknis.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP KOTA BIMA.



4. Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Bulan esember 2018 adalah sebanyak 29 Orang Pegawai dan 8 Orang tenaga Kontrak.

Pegawai berdasarkan kedudukan dalam organisasi

1. Menurut Jabatan/Eselon

Tabel 1. Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	0	0	0	1	1
2	Eselon III	0	0	2	2	4
3	Eselon IV	0	0	8	0	8
4	Non Eselon	5	1	10	0	16
	Jumlah					29

2. Menurut Golongan/Ruang

Tabel.2 Data Menurut Golongan/Ruang

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	0	0	1	2	3
2	S1	0	0	18	2	20
3	D3/D2/D1	0	0	1	0	1
4	SMA	0	5	0	0	5
5	SMP	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	5	20	4	29

C. KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi promosi dan penggalian potensi, pengendalian, perizinan dan melakukan kajian untuk regulasi-regulasi yang berkaitan dengan paket insentif dan kemudahan berusaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat digambarkan sebagai berikut :



1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kota Bima.
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal karena belum semua investor membuat laporan LKPM Melalui Kepala DPMPTSP dan LKPM secara online.
3. Rasio daya serap tenaga kerja yang ada dikota Bima
4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).
5. Belum semua database penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait
6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan sistem pelayanan perizinan secara online.
7. Masa berlaku izin Usaha berlaku seumur hidup yang menyebabkan kurangnya Realisasi jenis izin yang terbit.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan VISI Pemerintah Kota Bima : “ Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri. Dengan VISI Dpmptsp Kota Bima “ Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi yang Unggul. Berikut keterkaitan antara RPJMD dan Indikator kinerja pemerintah dengan Indikator Dpmptsp Kota Bima, dengan tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Bima

Tabel. 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2018	Target kinerja tujuan/sasaran tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Layanan)	76,86	78,86	80,86	84,86	88,86	92,86
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsetase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	10%	10%	10%	10%	10%	10%
			Porsetasi Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA	10%	10%	10%	10%	10%	10%

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP . Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

Tabel 2.2. Penetapan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra DPMPTSP 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi /Uraian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase peningkatan nilai investasi PMDN/PMA	$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Inves PMDN/PMA tahun N} - \text{Jumlah Realisasi Nilai Inv tahun N-1} \times 100\%}{\text{Jumlah Realisasi Invest tahun N-1}}$
		Porsentase peningkatan jumlah investor PMDN/PMA	$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Investor PMDN/PMA tahun N} - \text{Jumlah Realisasi investor tahun N-1} \times 100\%}{\text{Jumlah Realisasi Investor tahun N-1}}$



2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabilitas dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai tahun 2019.

Penetapan Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi dalam akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2019 Sebagai wujud penilaian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah, Penetapan Kinerja Merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan seluruh aparat DPMPTSP karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan DPMPTSP fokus dan terarah dalam mengelola program/kegiatan. Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2019 mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023. Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah (RKPD) tahun 2018, dokumen rencana strategis tahun 2018-2023, dokumen Rencana kerja (RENJA) DPMPTSP tahun 2019 dan DPA DPMPTSP Tahun 2019. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang ada.

1. Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	78,86
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase peningkatan nilai investasi PMDN/PMA	10 %
		Porsentase peningkatan jumlah investor PMDN/PMA	10 %

2. Sekretaris

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran 2. Cakupan ketersediaan Sarana dan prasarana perkantoran 3. Cakupan Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	100 % 100 % 100 %
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan	1. Cakupan temuan internal dan eksternal -Porsentase ketepatan penempatan antara program, kegiatan dan anggaran, Nilai LKIP oleh Inspektorat Kota Bima	100%

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terlaksananya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian	1. Jumlah Surat menyurat perkantoran yang diterima dan terdistribusi	550 lembar
	2. Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	5 Jasa pelayanan
	3. Jumlah ketersediaan peralatan perkantoran	22 Bh/Unit
	4. Jumlah ketersediaan perlengkapan perkantoran	2 Bh/Unit
	5. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	30 Bh/Unit
	6. Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	9 Dok
	7. Ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi BMD	Tepat Waktu
	8. Jumlah dokumen kepegawaian yang tersedia	12 dok
	9. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis PTSP	6 Orang
	10. Jumlah tamu yang terlayani dengan makan minum	250 Orang

b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terlaksananya peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan	1. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	5 Dok
	2. Jumlah Laporan Perencanaan	3 Laporan
	3. Jumlah Laporan Keuangan	3 laporan
	4. Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Laporan Penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah	2 Laporan
	5. Jumlah dokumen kebijakan internal yang diterbitkan	4 Dok
	6. Posentase keselarasan program, kegiatan dan anggaran internal	75 %
	7. Porsentase program, kegiatan dan anggaran yang terakumodir sesuai dengan kebutuhan DMPTSP pertahun	85%
	8. Presentase kepuasan Pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan	95 %

3. Kepala Bidang penanaman modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya minat investasi PMDN/PMA	Jumlah calon investor yang mengajukan izin investasi	50 Investor
2. Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Penanaman modal	porsentase perusahaan yang telah menerapkan peraturan penanaman modal	5%

a. Kasi Potensi dan promosi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. - tersusunnya regulasi pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet - tersusunnya regulasi penyelenggaraan non perizinan	Dokumen rancangan perda dan perwali	2 Dok
2. Terlaksananya Penyebarluasan informasi potensi dan peluang	Buku panduan/Saku LKPM Online	1 Dok

usaha		
-------	--	--

b. Kasi Kerjasama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	Jumlah Dokumen LKPM dan berita Acara	50 Perusahaan
2. terlaksananya kerjasama investasi	Jumlah kerjasama investasi yang disepakati	3 MOU

4. kabid. Pelayanan Perizinan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatkan Efektifitas pelayanan perizinan	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	1 Hari

a. Kasi Perijinan Non Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. terlaksananya jumlah verifikasi lapangan	Jumlah permohonan izin yang diverifikasi	1500 Izin Usaha/Non usaha

b. Kasi Perijinan Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Tersedianya Standar pelayanan terhadap setiap izin usaha/Non usaha yang diterbitkan	Jumlah Standar Pelayanan terhadap jenis izin yang diterbitkan	97 Dokumen
2. Terlaksananya pemberian pelayanan perizinan usaha / non usaha	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2500 izin usaha/non usaha

5. Kabid. Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatkan Efektifitas pelayanan perizinan	Porsentase izin yang telah ditebitkan	100%

a. Kasi Informasi dan Pengaduan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3

Terpenuhinya Dokumen Pedoman dan Tata cara pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin usaha dan Izin Operasional/Komersil PBTE	Pedoman Komitmen yang tersusun	24 pedoman pemenuhan komitmen
Terpenuhi tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat mengenai pelayanan perizinan	jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %
Terlaksananya survey IKM	Jumlah laporan IKM	4 Dokumen

b. Kasi Kebijakan dan inovasi Pelayanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terlaksananya Sosialisasi Perizinan yang terintegrasi Secara Elektronik (Online)	Jumlah Izin Yang terintegrasi secara Elektronik (Online)	10 Jenis izin usaha
2. tersedianya Dokumen Realisasi Investasi tiap tahun	Dokumen Realisasi Investasi	1 Dokumen

2.4 Anggaran Kegiatan Tahun 2019

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Penanaman modal dan PTSP.

a. Program Pelayanan	670.759.000,00
Administrasi Perkantoran	
1 Penyediaan jasa surat menyurat	54.250.000,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	46.200.000,00
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.500.000,00
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.464.000,00
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.600.000,00
6 Penyediaan alat tulis kantor	40.564.400,00
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.900.000,00
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,00
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	8.500.000,00
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	113.680.000,00
11 Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000,00
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	240.600.600,00
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	360.875.000,00
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	90.500.000,00
2 Pengadaan peralatan gedung kantor	43.000.000,00



3	Pengadaan mebeleur	0,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	175.000.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41.275.000,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000,00
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.100.000,00
c. Program peningkatan disiplin aparatur		30.233.500,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	16.720.000,00
2	Pengadaan Pakaian Olahraga	13.513.500,00
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,00
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00
e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		128.450.000,00
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.500.000,00
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12.250.000,00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	54.600.000,00
4	Penyusunan LAKIP dan LPPD	18.500.000,00
5	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	37.600.000,00
f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		110.575.801,00
1	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	85.245.562,00
2	Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antar daerah	25.330.239,00
g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		178.309.199,00
1	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	70.734.199,00
2	Kajian kebijakan penanaman modal	107.575.000,00
h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		627.550.000,00
1	Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	81.200.000,00
2	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	183.100.000,00
3	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	70.500.000,00
4	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	30.000.000,00
5	Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53.500.000,00
6	Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan	66.000.000,00
7	Pendataan Potensi Obyek Perijinan	37.500.000,00
8	Kegiatan survey dan peninjauan lapangan kelayakan usaha	105.750.000,00
Total		2.106.752.500,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara priodik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan VISI Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima. Untuk memudahkan dalam menilai kinerja dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Jumlah Nilai	Kategori
(1)	(2)	(3)
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Bahwa pada Tahun 2019 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama dengan rata-rata pencapaian diatas 100%, dengan nilai rata-rata capaian dari ketiga indikator tersebut yakni 214% , dimana semua sasaran masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 .

Tabel 3. 2. Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No	Kategori	Sasaran	Persentase Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sangat Tinggi	2	214
2.	Tinggi	0	0
3.	Sedang	0	0
4.	Rendah	0	0
5.	Sangat Rendah	0	0
Jumlah		2	214

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Bahwa pada Tahun 2019 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 sasaran dimana semua sasaran masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.1.1. Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capain Porsentase (%)
Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	78,86	80,90	102%
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase peningkatan nilai investasi PMDN/PMA	10 %	25%	254%
		Porsentase peningkatan jumlah investor PMDN/PMA	10%	29%	286%



Dari tabel diatas dapat dijelaskan lebih rinci terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari capaian indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2019, berikut disajikan dalam tabel :

Tabel. 3.1.1.2. Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	78,86	80,90	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	1 Hari	1 Hari	100%
					Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkandi PTSP	2000 lembar izin	2715 Lembar Izin	135,75%
					Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	jumlah jenis izin online yang tersosialisasikan	10 jenis izin	10 jenis izin	100%
					Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	jumlah media informasi mengenai pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



2						perizinan				
						Melakukan Pendaftaran Obyek Perijinan	Jumlah pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha dan yang melakukan perpanjangan izin usaha dan non usaha	100 Pelaku Usaha	120 Pelaku usaha	120%
						Melakukan verifikasi lapangan	Jumlah permohonan izin yang diverifikasi	900 jenis usaha	1350	150%
						Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
						Survey kepuasan masyarakat	Jumlah laporan IKM	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
						Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan	Dokumen laporan realisasi perizinan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase peningkatan nilai investasi PMDN/PMA	10 %	25%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah calon investor yang mengajukan izin investasi	50 Investor	562 Investor	1124%



					Penyusunan profil penanaman modal di daerah	dokumen profil penanaman modal yang disajikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Penyusunan rancangan pengaturan Kemudahan Berinvestasi	Dokumen Rancangan Perda	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Porsentase peningkatan jumlah investor PMDN/PMA	10 %	29%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	porsentase perusahaan yang telah menerapkan peraturan penanaman modal	10%	29%	286%
					pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Usaha yang terpantau pelaksanaan penanaman Modal	32 Perusahaan	48 Perusahaan	150%
					kerjasama Investasi antar daerah	Jumlah kerjasama investasi antar daerah yang disepakati	3 MOU	3 MOU	100%



3.1.2 EVALUASI KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Adapun data pendukung capaian kinerja pada indikator persentase perencanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2019 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.12. Evaluasi Keselaraan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

No	Program/Kegiatan	ProgNas 2019	ProgProv 2019	RPJMD 2023	RKPD 2019	KUA/PPAS 2019	RENSTRA 2020-2023	Renja 2019	RKT 2019	DPA/DPPA 2019	PK/Reviu 2019
URUSAN BERSAMA											
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Program peningkatan disiplin aparatur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URUSAN PENANAMAN MODAL											
6.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URUSAN PERIZINAN & INFORMASI PENGADUAN											
8.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total	2	2	8	8	8	8	8	8	8	8



3.1.3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang dicerminkan dalam Capaian Indicator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. **Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Tolok ukur capaian kinerja sasaran “Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ” dengan indikator sasaran :

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Tabel. Pengukuran Kinerja IKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9=8/7*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan)	74,86	76,86	102%	78,86	80,90	102%

Capaian kinerja IKM ditahun 2019 ditargetkan dengan Skor 78,86 dan terealisasi dengan Skor 80,90 atau sebesar 105%. Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2019 ternilai sangat baik karena mencapai angka diatas 100%

Jika dilihat dari capaian tahun 2018, IKM telah mencapai 102 % atau dengan Skor IKM dengan Realisasi 76,86 maka ditahun 2019 terjadi peningkatan menjadi Skor 4,04 atau 3 % dari tahun lalu.

Dapat digambarkan dengan Grafik Realisasi IKM sebagai berikut :



Untuk mengetahui skala pencapaian Nilai IKM, berikut ditampilkan skala Nilai persepsi, Interval IKM, Intervasi Konvesri IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan pada tabel. 3.a berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Jika dilihat dengan Pencapaian IKM Dpmptsp tahun 2019 bahwa “BAIK” Yakni dengan Skor 80,9, atau dapat disajikan dengan tabel berikut ini.

Tabel Rekapitulasi pencapaian Indikator Utama Untuk IKM

No	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	3,45	80,9	B	BAIK

Realisasi tersebut dicapai melalui 1 program dan 8 kegiatan antara lain :

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan realisasi rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan 1 Hari, terdiri dari :



- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu terealisasi sebanyak 2715 lembar izin usaha/non usaha
- b. Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu terealisasi sebanyak 10 jenis usaha yang telah tersosialisasikan.
- c. Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan teralisasi sebanyak 1 Dokumen
- d. Melakukan Pendataan Obyek Perijinan terealisasi sebanyak 120 jenis usaha yang dilakukan pendataan atas izin usaha yang telah berakhir masa berlaku maupun yang belum memiliki izin usaha.
- e. Melakukan verifikasi lapangan terealisasi sebanyak 1350 jenis izin usaha/non usaha yang telah dilakukan kelayakan verifikasi lapangan
- f. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat teralisasi dengan 100% tindak lanjut permasalahan pengaduan
- g. Survey kepuasan masyarakat terealisasi sebanyak 2 Dokumen per tahun dengan pencapaian Nilai Skor IKM 80,90 yang dipengaruhi oleh peningkatan proses pelayanan serta indikator yang menunjang IKM tersebut.
- h. Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan terealisasi sebanyak 12 Dokumen izin Usaha/non Usaha

b. Porsentase peningkatan nilai investasi PMDN/PMA

Tolok ukur capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai Investasi “dengan indikator sasaran : Porsentase Peningkatan nilai Investasi :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Inves PMDN/PMA tahun N} - \text{Jumlah Realisasi Nilai Inv tahun N-1} \times 100\%}{\text{Jumlah Realisasi Invest tahun N-1}}$$



Tabel. Pengukuran Kinerja Porsentase Nilai Investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	2	3	4	5	$6 = 5/4*100$	7	8	$9=8/7*100$
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase Peningkatan nilai Investasi PMDN/PMA	10 %	23,63%	236,3%	10 %	25 %	254%

Capaian Porsentase Peningkatan Nilai Investasi ditahun 2019 ditargetkan dengan kenaikan 10% ditiap tahunnya dan terealisasi dengan kenaikan 25% ditahun 2019 atau sebesar 254%. Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2019 ternilai sangat baik karena mencapai angka diatas 100%

Jika dilihat dari capaian tahun 2018, Porsentase Peningkatan Nilai Investasi mengalami peningkatan sebesar 23,63% atau dengan capaian kenaikan sebesar 236,3% . terkait data Realisasi Nilai Investasi ditahun 2017 jika disandingkan dengan perhitungan pada perbandingan tahun 2018 ada Nilai investasi yang tidak tercover dalam perhitungan dikarenakan terjadinya penghapusan izin prinsip oleh BKPM sesuai dengan peraturan BKPM No.13 tahun 2017. Izin Prinsip tidak berlaku lagi sejak tanggal 2 januari 2018, karena telah digantikan dengan pendaftaran penanaman Modal atau Pendaftaran Investasi (PI) yang digantikan langsung dengan Izin Usaha (IU), sehingga semua data yang tertuang dalam laporan Realisasi investasi dan Jumlah investor murni menggunakan data realisasi izin usaha berdasarkan pendaftaran penanaman Modal atau pendaftaran Investasi sesuai dengan arahan BKPM serta Perwali Nomor 35 tahun 2018.

BERIKUT DATA NILAI INVESTASI TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 BERDASARKAN NILAI INVESTASI PELAKU USAHA YANG ADA DIKOTA BIMA

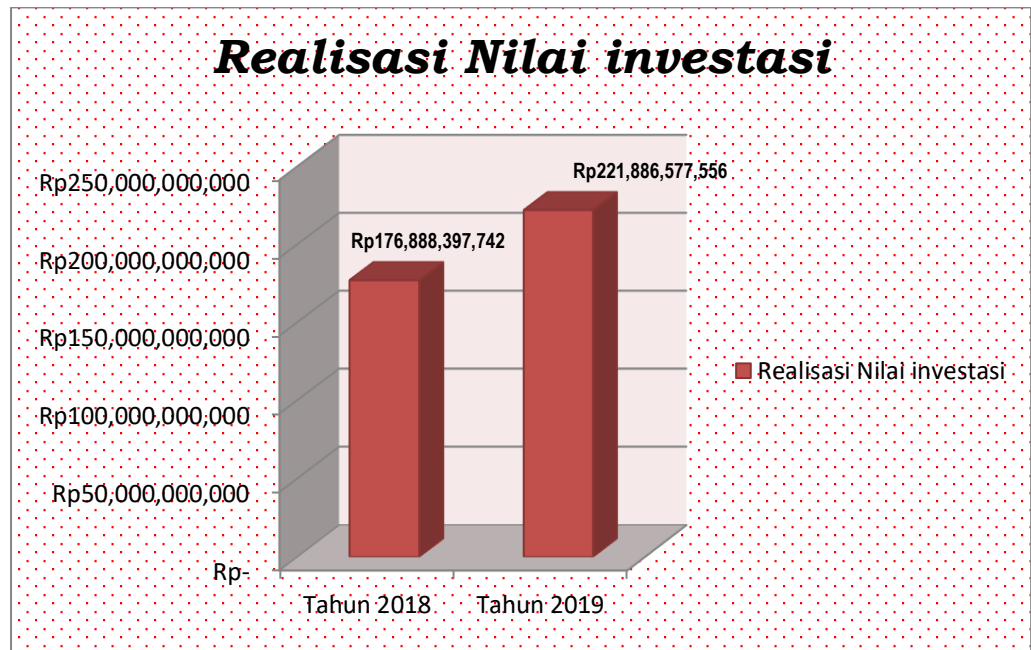
Tabel. Rekapitulasi nilai Investasi Pelaku usaha dikota Bima

No	Jumlah Nilai Investasi tiap Bulan nya	Tahun 2018 Dalam (Rp)	Tahun 2019 Dalm (Rp)
1	Januari	1.324.200.000	5.634.000.000
2	Februari	6.703.000.000	25.363.000.000
3	Maret	7.972.500.000	11.786.000.000
4	April	6.685.000.000	15.515.000.000
5	Mei	8.480.000.000	12.214.000.000
6	Juni	3.503.000.000	32.801.891.000
7	Juli	7.852.000.000	6.670.000.000

8	Agustus	7.705.000.000	16.790.000.000
9	September	4.709.000.000	24.202.093.278
10	Oktober	41.702.500.000	26.925.000.000
11	November	63.410.397.742	19.025.500.000
12	Desember	16.841.800.000	24.960.093.278
	Jumlah Total Investasi	176.888.397.742	221.886.577.556

Sumber data laporan perizinan DPMPPTSP

Berikut disajikan Grafik Realisasi Nilai investasi :



Realisasi tersebut dicapai melalui 1 program dan 2 kegiatan antara lain :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan realisasi 254% dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan profil penanaman modal di daerah terkait profil penanaman modal yang ada dikota bima yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi dikota Bima
 - b. Penyusunan rancangan pengaturan Kemudahan Berinvestasi memberikan kemudahan dan Insentif usaha dalam proses pelayanan perizinan yang sesuai dengan Moto perizinan melayani dengan " CEPAT".



c. **Porsentase Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA**

Tolok ukur capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai Investasi” dengan indikator sasaran : Porsentase Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Investor PMDN/PMA tahun N} - \text{Jumlah IRealisasi nvestor tahun N-1} \times 100\%}{\text{Jumlah Realisasi Investor tahun N-1}}$$

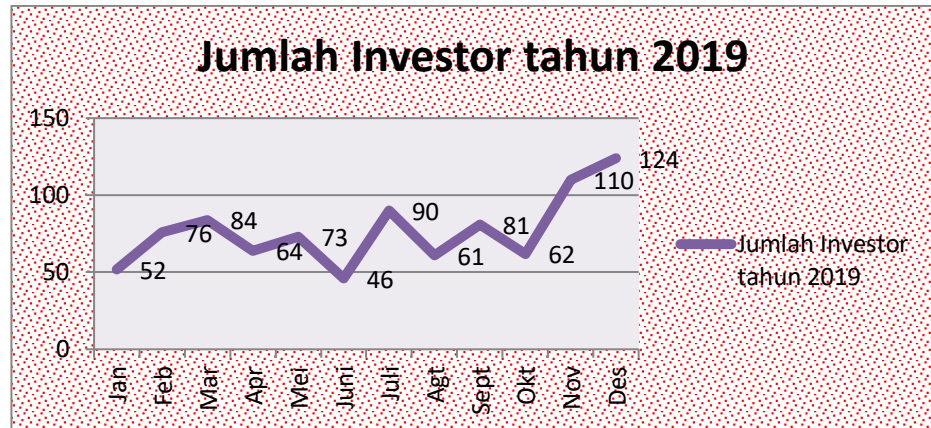
Tabel Pengukuran Kinerja Porsentase Peningkatan jumlah Investor PMDN/PMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 \times 100$	7	8	$9 = 8/7 \times 100$
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Porsentase Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA	10 %	13 %	128%	10 %	29 %	286%

Capaian Porsentase Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA ditahun 2019 ditargetkan dengan kenaikan 10% ditiap tahunnya dan terealisasi dengan kenaikan 29% ditahun 2019 atau sebesar 286%. Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2019 ternilai sangat tinggi karena mencapai angka diatas 100% atau berhasil

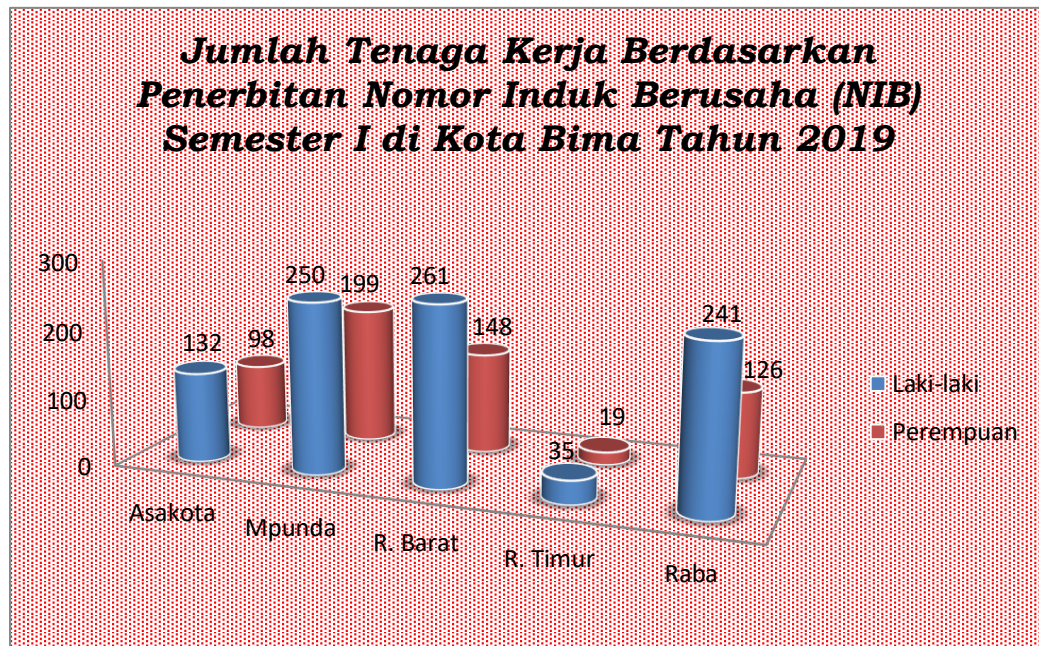
Jika dilihat dari capaian tahun 2018, Porsentase Peningkatan Jumlah Investror PMDN/PMA ditahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 13% atau dengan capaian peningkatan sebesar 128% . jika dilihat dari data tersebut capaian kinerja pada tahun 2018 ternilai sangat tinggi karena mencapai diatas 100% atau berhasil.

Berikut Grafik Rekapitulasi perbulan Jumlah Investor PMDN/PMA tahun 2019 dikota Bima



Selaras dengan Jumlah tenaga kerja berdasarkan Nomor Induk Berusaha yang ada dikota bima, Jika dikaitkan dengan dua Indikator yang menjadi tolak ukur “ Meningkatnya Nilai Investasi dengan dua Indikator “ Porsentase Peningkatan Nilai Investasi dan Porsentase Jumlah Investor PMDN/PMA, dengan disajikan dalam bentuk grafik berikut :

Grafik Jumlah tenaga kerja berdasarkan Penerbitan NIB (Nomor Induk berusaha)



Sumber data Database perizinan tahun 2019

Realisasi tersebut dicapai melalui 1 program dan 2 kegiatan antara lain :



1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan realisasi 289% didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
 - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal dengan realisasi kepatuhan para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pelaporan Kegiatan penanaman modal (LKPM) dengan realisasi sebanyak 48 perusahaan yang ada dikota bima.
 - b. kerjasama Investasi antar daerah dengan realisasi 3 MOU, yang terjalin dengan BPJS Kesehatan kota Bima, BPJS Ketenagakerjaan Kota Bima, KPP Pratama Kota Bima.

3.1.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Evaluasi kinerja dilakukan guna membandingkan keberhasilan dari setiap indikator kinerja terhadap sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator-indikator tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh sejumlah indikator yang realisasinya lebih dari atau sama dengan 100%, sehingga dapat diperhitungkan bahwa Capaian Kinerja dikatakan efisien apabila realisasi program lebih kecil dibanding realisasi kinerja.

Untuk mencapai target tiga indikator yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mengalokasikan belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp 2.106.752.500,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 2.072.638.646,00 atau 98,38 %. Dengan tingkat capaian rata-rata indikator Sasaran Strategis Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima sebesar 241% hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima telah melakukan capaian kinerja secara efisien dan berhasil dengan capaian diatas 100%.



Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan seperti pada Tabel berikut:

:

Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2019
Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4	7	8	
2	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2.12	Bidang Penanaman Modal					
1.	2.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	69,24	98,02	ST
	2.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pemanfaatan jasa surat menyurat	75,00	100,00	ST
	2.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00	97,78	ST
	2.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase pemenuhan pelayanan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	85,00	78,04	T
	2.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	88,61	100,00	ST
	2.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pemenuhan pelayanan kebersihan kantor	98,00	100,00	ST
	2.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	76,70	99,94	ST
	2.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	110,30	100,00	ST
	2.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	113,70	100,00	ST
	2.12.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan penyediaan dan perlengkapan kebutuhan bangunan kantor	0,00	-	R
	2.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	63,70	98,33	ST
	2.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase tamu dan pegawai yang dilayani	120,00	100,00	ST
	2.12.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pejabat dan pegawai yang mengikuti rapat koordinasi luar daerah	149,50	99,93	ST
2.	2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana perkantoran	32,90	98,73	ST
	2.12.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan perlengkapan Kantor	79,90	96,46	ST
	2.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Porsentase Pemenuhan Peralatan Gedung kantor	25,00	99,58	ST
	2.12.02.10	Pengadaan mebeleur	Porsentase Pemenuhan Meubeler	0,00	-	R
	2.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	porsentase pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85,00	99,31	ST



	2.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	94,20	100,00	ST
	2.12.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100,00	100,00	ST
	2.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	100,50	100,00	ST
3.	2.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase keseragaman pakaian pegawai menunjang pelayanan perzinan	97,80	100,00	ST
	2.12.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Porsentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	97,80	100,00	ST
	2.12.03.06	Pengadaan Pakaian Olahraga	Porsentase Pemenuhana pakaian seragam olahraga	99,96	100,00	ST
4.	2.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	0,00	-	R
	2.12.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	persentase Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	0,00	-	R
5.	2.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Porsentase temua internal dan eksternal - Porsentase ketepatan penempatan antara program, kegiatan dan anggaran, Nilai LKIP oleh Inspektorat Kota Bima	76,70	99,42	ST
	2.12.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disampaikan tepat waktu	100,00	95,45	ST
	2.12.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sesuai dengan SAP	100,00	100,00	ST
	2.12.06.05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	Jumlah dokumen perencanaan Kagiatan dan anggaran	1.880,00	100,00	ST
	2.12.06.06	Penyusunan LAKIP dan LPPD	Jumlah dokumen Akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawabab penyelenggaraan pemerintah daerah	100,00	100,00	ST
	2.12.06.07	Peningkatan Manajemen asset/barang Daerah	Jumlah dokumen Pelaporan Inventarisasi Asset	300,00	98,67	ST
6.	2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Porsentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	192,60	98,88	ST
	2.12.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Usaha yang terpantau pelaksanaan penanaman Modal	61,52	98,58	ST
	2.12.15.12	Peningkatan koordinasi dan kerjasama Investasi antar daerah	Jumlah kerjasama investasi antar daerah yang disepakati	0,00	99,88	ST
7.	2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Porsentase peningkatan jumlah investor PMDN/PMA	220,40	99,60	ST
	2.12.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	tersedianya dokumen profil penanaman modal	100,00	100,00	ST
	2.12.16.07	Kajian kebijakan penanaman modal	tersedianya regulasi penanaman modal	300,00	99,34	ST
8.	2.12.51	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	221,19	97,84	ST
	2.12.51.02	Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	Jumlah informasi pelayanan dan pengembangan pelayanan perizinan	100,00	98,18	ST
	2.12.51.04	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	68,00	98,18	ST
	2.12.51.07	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	prosentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan atau yang ditindak lanjuti	108,50	95,60	ST
	2.12.51.08	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan IKM	50,00	94,17	ST
	2.12.51.09	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	jumlah jenis izin online yang tersosialisasikan	100,00	100,00	ST

2.12.51.11	Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan	Dokumen laporan realisasi perizinan	100,00	97,73	ST
2.12.51.12	Pendataan Potensi Obyek Perijinan	Jumlah pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha dan yang melakukan perpanjangan izin usaha dan non usaha	75,00	100,00	ST
2.12.51.13	Kegiatan Survei dan Peninjauan Lapangan Kelayakan Usaha	Jumlah izin yang layak diberikan izin usaha / perpanjang izin usaha dan non usaha	100,00	97,73	ST

Ket : ST = Sangat Tinggi
T = Tinggi
S = Sedang
R = Rendah

3.2 CAPAIAN KINERJA ESELON

Dapat disajikan dalam tabel Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV :

3.2.1. Capaian Kinerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capain (%)		Penjelasan
					2018	2019	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	I. Rata-rata IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	78,86	80,90	94,59%	102%	Berhasil
2.	Meningkatnya Nilai Investasi	II. Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	10 %	25%	236,3%	254%	Berhasil
		III. Porsentase Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA	10 %	29%	128%	286%	Berhasil

3.2.2 Capaian Kinerja Eselon III

a. Sekretris

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		Ket
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
1. Meningkatkan pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian	1. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	100 %	100%	100	100	Berhasil
	2. Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100%	100	100	Berhasil
	3. Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100 %	100%	100	100	berhasil
	4. Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100	100	Berhasil
2. Meningkatnyakualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan	1. Persentase keselarasan pelaksanaan program	100 %	100%	100	100	berhasil

	dengan dokumen perencanaan					
	2. Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Kota Bima	BB	BB	BB	BB	berhasil
	3. Kesesuaian laporan keuangan DMPTSP dengan SPI dan SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Berhasil

b. Kepala Bidang Penanaman modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		KET
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
1. Meningkatnya minat investasi PMDN/PMA	Jumlah calon investor yang mengajukan izin investasi	50 Investor	562 investor	1000	1124	Berhasil
2. Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Penanaman modal	persentase perusahaan yang telah menerapkan peraturan penanaman modal	5 %	6%	100	120	Berhasil

c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)		KET
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
1. Meningkatnya Efektifitas pelayanan perizinan	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	1 Hari	1 Hari	100	100	Berhasil

d. Kepala Bidang Informasi pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)		Ket
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
1. Meningkatnya Efektifitas pelayanan perizinan	persentase izin yang diterbitkan yang tepat waktu	100	100	100	100	Berhasil

3.2.3. Capaian Kinerja Eselon IV

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)		KET
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
Terlaksananya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan	1. Jumlah Surat menyurat perkantoran yang diterima dan terdistribusi	550 lembar	550 lembar	100	100	Berhasil
	2. Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi	5 Jasa pelayanan	5 jasa pelayanan	100	100	Berhasil

kepegawaian	perkantoran					
	3. Jumlah ketersediaan peralatan perkantoran	22 Bh/Unit	22 Bh/Unit	100	100	Berhasil
	4. Jumlah ketersediaan perlengkapan perkantoran	2 Bh/Unit	2 Bh/Unit	100	100	Berhasil
	5. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	30 Bh/Unit	30 Bh/Unit	100	100	Berhasil
	6. Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	9 Dok	9 Dok	100	100	Berhasil
	7. Ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi BMD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100	Berhasil
	8. Jumlah dokumen kepegawaian yang tersedia	12 dok	12 dok	100	100	Berhasil
	9. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis PTSP	6 Orang	6 Orang	100	100	Berhasil
	10. Jumlah tamu yang terlayani dengan makan minum	250 Orang	250 Orang	100	100	Berhasil

b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)		KET
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
Terlaksananya peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan	1. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	5 Dok	5 Dok	100	100	Berhasil
	2. Jumlah Laporan Perencanaan	3 Laporan	3 Laporan	100	100	Berhasil
	3. Jumlah Laporan Keuangan	3 laporan	3 Laporan	100	100	Berhasil
	4. Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Laporan Penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah	2 Laporan	2 Laporan	100	100	Berhasil
	5. Jumlah dokumen kebijakan internal yang diterbitkan	4 Dok	4 Dok	100	100	Berhasil
	6. Posentase keselarasan program, kegiatan dan anggaran internal	75 %	90%	100	120	Berhasil
	7. Porsentase program, kegiatan dan anggaran yang terakumodir sesuai dengan kebutuhan DMPTSP pertahun	85%	90%	100	105	Berhasil
	8. Presentase kepuasan Pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan	95 %	95%	100	100	Berhasil

c. Kepala Seksi Potensi dan promosi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN %		KET
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
1. terlaksananya penyusunan informasi penanaman modal	dokumen profil penanaman modal yang disajikan	1 Dok	1 dok	100	100	Berhasil
2. Tersusunya peraturan daerah tentang kemudahan berinvestasi	Dokumen Rancangan Perda	1 Dok	1 Dok	100	100	Berhasil

d. Kepala Seksi Kerjasama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		KET
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
1. terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Usaha yang terpantau pelaksanaan penanaman Modal	32 Perusahaan	48 perusahaan	100	150	Berhasil
2. terlaksananya kerjasama investasi antar daerah	Jumlah kerjasama investasi antar daerah yang disepakati	3 MOU	3 MOU	100	100	Berhasil

e. Kepala Seksi Perizinan Non Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)		KET
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
1. Terlaksananya pendataan obyektif perizinan	Jumlah pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha dan yang melakukan perpanjangan izin usaha dan non usaha	100 pelaku usaha	120	100	120	Berhasil
2. terlaksananya jumlah verifikasi lapangan	Jumlah permohonan izin yang diverifikasi	900 izin usaha / non usaha	1350	120	150	Berhasil

f. Kepala Seksi Perizinan Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)		KET
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
1. Terlaksananya pemberian pelayanan perizinan usaha / non usaha	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan PTSP	2000 lembar izin	2715	125%	135,75 %	Berhasil

g. Kasi Layanan Informasi dan Pengaduan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)		KET
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
1. Tersedianya informasi perizinan	jumlah media informasi mengenai pelayanan perizinan	1 Dok	1 Dok	100	100	Berhasil
2. terpenuhi tindak lanjut terhadap pengaduan	jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak	100 %	100%	100	100	Berhasil



masyarakat mengenai pelayanan perizinan	lanjuti					
3. Terlaksananya survey IKM	Jumlah laporan IKM	2 Dokumen	2 Dok	100	100	Berhasil

h. Kasi Kebijakan dan Inovasi pelayanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)		KET
				2018	2019	
1	2	3	4	5		6
1.tersedianya laporan mengenai jumlah dan jenis izin yang diterbitkan setiap bulan	Dokumen laporan realisasi perizinan	12 Dokumen	12 Dok	100	100	Berhasil
2.terlaksananya sosialisasi perizinan online	jumlah jenis izin online yang tersosialisasikan	10 Izin Usaha	10 Izin Usaha	100	100	Berhasil

3.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2019, kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.106.752.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.072.638.646,00 atau 98,38 %.

Adapun realisasi Belanja Langsung tahun 2019 sebagai berikut

Tabel. 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
b.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.759.000,00	657.491.829,00	13.267.171,00	98,02
1	Penyediaan jasa surat menyurat	54.250.000,00	54.250.000,00	0,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	46.200.000,00	45.172.739,00	1.027.261,00	97,78
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.500.000,00	5.852.750,00	1.647.250,00	78,04
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.464.000,00	57.464.000,00	0,00	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	40.564.400,00	40.541.000,00	23.400,00	99,94



7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	100,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	-
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	113.680.000,00	111.780.000,00	1.900.000,00	98,33
11	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	240.600.600,00	240.431.340,00	169.260,00	99,93
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		360.875.000,00	356.290.000,00	4.585.000,00	98,73
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	90.500.000,00	87.300.000,00	3.200.000,00	96,46
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	43.000.000,00	42.820.000,00	180.000,00	99,58
3	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	0,00	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	175.000.000,00	173.795.000,00	1.205.000,00	99,31
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41.275.000,00	41.275.000,00	0,00	100,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00
c. Program peningkatan disiplin aparatur		30.233.500,00	30.233.500,00	0,00	100,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	100,00
2	Pengadaan Pakaian Olahraga	13.513.500,00	13.513.500,00	0,00	100,00
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,00	0,00	0,00	-
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00	0	0,00	-

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		128.450.000,00	127.700.000,00	750.000,00	99,42
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.500.000,00	5.250.000,00	250.000,00	95,45
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00
4	Penyusunan LAKIP dan LPPD	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00
5	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	37.600.000,00	37.100.000,00	500.000,00	98,67
f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		110.575.801,00	109.332.155,00	1.243.646,00	98,88
1	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	85.245.562,00	84.031.916,00	1.213.646,00	98,58
2	Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antar daerah	25.330.239,00	25.300.239,00	30.000,00	99,88
g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		178.309.199,00	177.595.999,00	713.200,00	99,60
1	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	70.734.199,00	70.734.199,00	0,00	100,00
2	Kajian kebijakan penanaman modal	107.575.000,00	106.861.800,00	713.200,00	99,34
h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		627.550.000,00	613.995.163,00	13.554.837,00	97,84
1	Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	81.200.000,00	79.725.346,00	1.474.654,00	98,18
2	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	183.100.000,00	179.772.750,00	3.327.250,00	98,18
3	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	70.500.000,00	67.398.167,00	3.101.833,00	95,60
4	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	30.000.000,00	28.250.000,00	1.750.000,00	94,17
5	Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	100,00
6	Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan	66.000.000,00	64.500.000,00	1.500.000,00	97,73
7	Pendaftaran Potensi	37.500.000,00	37.499.800,00	200,00	100,00



	Obyek Perijinan				
8	Kegiatan survey dan peninjauan lapangan kelayakan usaha	105.750.000,00	103.349.100,00	2.400.900,00	97,73
	Total	2.106.752.500,00	2.072.638.646,00	34.113.854,00	98,38

Dari tabel diatas sebagai mana tertera di atas dapat dijelaskan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi adalah sebesar Rp. 916.435.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi total anggaran sebesar Rp. 110.575.801,00, dengan kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebesar Rp. 85.245.562,00, dan Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antar daerah sebesar Rp. 25.330.239,00
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi total anggaran sebesar Rp. 178.309.199,00, dengan Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah sebesar Rp. 70.734.199,00, Kajian kebijakan penanaman modal sebesar Rp. 107.575.000,00.
- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan sebesar Rp. 627.550.000,00, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1 Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan 81.200.000,00
 - 2 Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu 183.100.000,00
 - 3 Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat 70.500.000,00
 - 4 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 30.000.000,00
 - 5 Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 53.500.000,00
 - 6 Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan 66.000.000,00
 - 7 Pendataan Potensi Obyek Perijinan 37.500.000,00
 - 8 Kegiatan survey dan peninjauan lapangan kelayakan usaha 105.750.000,00



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima. Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Dari Hasil pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima, maka di ambil Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

1. **KESIMPULAN**

Secara garis besar, pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

- a. Dari dua Sasaran Strategis dan Tiga Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu :
 1. Sasaran Strategis “ Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dengan Indikator utama yakni IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan) : Pada tahun 2019 Mengalami peningkatan Skor IKM Sebesar 80,90 dibanding tahun 2018 skor IKM sebesar 78,86 hal ini mengalami kenaikan sebesar 2,04.
 2. Sasaran Strategis “ Meningkatkan Nilai Investasi dengan Dua Indikator sebagai berikut :
 - Porsentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA: pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 25 % atau dengan capaian 254%
 - Porsentase Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA : pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 29%, atau dengan capaian 289%
- b. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan tersebut berjalan efektif adalah :
 1. Tersedianya anggaran yang cukup;
 2. Adanya Kemitraan dan koordinasi dengan Dinas/badan teknis terkait;
 3. Tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup memadai;
 4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.



- c. Melihat konsistensi pencapaian kinerja tahun 2019 dengan dokumen RENSTRA Perubahan atas Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima tahun 2018 - 2023, maka dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat kaitan logis mulai dari kegiatan sampai ke pencapaian visi.
- d. Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sampai dengan 31 Desember 2019, dibiayai dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.106.752.500,00- dengan realisasi sebesar Rp. 2.072.638.646,00 atau 98,38 %.

2. SARAN

- a. Salah satu cara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan untuk lebih mempercepat akselerasi pembangunan di Kota Bima , antara lain adalah
 1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pelayanan publik;
 2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam proses pelayanan perijinan;
 3. Mempertahankan dan lebih meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar bidang dalam rangka peningkatan kinerja;
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam kualitas pelayanan perijinan di daerah Kota Bima;
 5. Mendorong dan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan melalui berbagai sosialisasi dan memberikan sosialisasi mengenai perizinan online melalui OSS.
- b. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dikemudian hari.

Kota Bima, Februari 2020

Kepala Dinas,

Drs. H. Syarifuddin, M.AP

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19621029 199403 1 002